

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Baitullah, 2011, *Hukum perlindungan Konsumen*, Nusa Media, Bandung.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Ali Achmad Chomzah, 2003, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Chalid Narbuko dan Sri Mamudji, 2007, *Metode Penelitian*, Bumi Aksa, Jakarta.
- Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, 2004, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Eko Hadi Wiyono, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Palanta, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2016, *Buku Panduan Akademik*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Gatot Supramono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hans Kelsen, 1991, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, New York
- Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Khatibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Prosedur dan Tahapan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga-Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badrul Zaman, 1981, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.

Racmad Syafa'at, 2006, *Mediasi dan Advokasi Konsep dan Implementasinya*, Agritek YPN Malang Kerjasama dengan SOFA Press, Malang.

Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementas*, Kencana, Jakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media, Jakarta

Y. Kusumadewi, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Media, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No.30 Tahun 1999

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006, Pasal 3 ayat (1)

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. PERMA No.1 Tahun 2006

Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 84/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Pdg.

Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 307/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Mdn.

Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Sbg

Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Lsm

Jurnal

- Ahmad Wahidi, Musataklima, dan Nur Jannani, 2023, Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dan Pengadilan Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 23, Nomor 1.
- Arianto Hulu, A.A. Laksmi Sagung Dewi, dan Ni Made Karma Sukaryati, 2020, Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus : Putusan BPSK Badung No.01/AP/BPSK/IV/2016), *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Hendra Muchlis, 2008, Upaya Hukum Konsumen Melalui Pengadilan, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- La Ode Ismail, 2022, Penyelesaian Sengketa Konsumen di Bidang Elektronik Pada Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), *Jurnal Delarev*, Fakultas Hukum Universitas Nahdatul Ulama, Sulawesi Tenggara, Vol. 1, No.2, Agustus 2022
- M. Afsari, 2023, Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Usaha di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten, *Disertasi Doktor*, Universitas Hasanuddin.
- Muhammad Al Farid, 2024, Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pada Putusan Pengadilan Negeri Padang No.84/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN-PDG, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Novi Triani Gea, 2002, Efektifitas badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Sebagai lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui Mediasi Dan Arbitrase, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan.
- Rida Ista Sitepu and Hana Muhamad, 2022, Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia, *Jurnal Rechten*, Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 3, no. 2.
- Rimanda, R. 2019, Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Di Indonesia, *Jurnal*, Bina Mulia Hukum.
- Suharman Rahmat, 2014, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Serang, *Makalah Presentasi* dalam Acara Sosialisasi Perlindungan Konsumen, Serang, 4 Desember

Sulaiman, 2016, Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, *Makalah BPSK*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Sulastri, 2020, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jasa Transportasi, *Jurnal Hukum Progresif*, 2020, Vol. 10 No. 1.

Tegar Fransiskus Silalahi, 2023, Kajian Hukum Terhadap Permohonan Keberatan Oleh Konsumen Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan di pengadilan Negeri Kota Medan (Terhadap Putusan Nomor 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan.

Tuti Kelana Sembiring dan Susanti Sembiring, 2021, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pembatalan Terhadap Putusan BPSK Pada Sengketa Konsumen, *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Ekasakti, Padang, Vol.1, Issue 2, Desember 2021.

Internet

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi. Profil Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi. Diakses dari https://ppid.butonkab.go.id/storage/dokumen/30360000237_profil_bpsk_bkt.pdf

Gustav Radbruch dalam Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, <http://hukum.kompasiana.com> (02/04/2011), diakses pada 15 november 2025